

ISU-ISU PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (KELUARGA DAN MASYARAKAT): DEFINISI, TANTANGAN, DAN SOLUSI

Sukari¹, Fityatul Muharromah², Asmira Efendi³

^{1,2,3}Institut Islam Mamba'ul Ulum, Surakarta

* Corresponding Email: sukarisolo5@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan luar sekolah (PLS) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang mencakup pendidikan non-formal dan informal dalam keluarga serta masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran, tantangan, dan solusi strategis PLS dalam mendukung pendidikan formal, terutama pada era digital dan pascapandemi. Melalui studi pustaka terhadap berbagai penelitian terkini, ditemukan bahwa PLS memiliki kontribusi penting dalam penguatan karakter, pemerataan akses pendidikan, dan pengembangan kecakapan hidup. Namun, PLS masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kesenjangan sosial ekonomi, rendahnya literasi digital, minimnya keterlibatan orangtua, fragmentasi program berbasis masyarakat, serta dampak signifikan pandemi COVID-19 terhadap akses dan kualitas pembelajaran. Kajian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, peningkatan literasi digital, serta integrasi program komunitas untuk memperkuat peran PLS dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: pendidikan luar sekolah, pendidikan non-formal, pendidikan informal, literasi digital, keterlibatan orangtua, komunitas belajar.

ABSTRACT

Out-of-school education (OECD) is an integral part of the national education system, encompassing non-formal and informal education within families and communities. This study aims to examine the role, challenges, and strategic solutions of OECD in supporting formal education, particularly in the digital era and post-pandemic. Through a literature review of various recent studies, it was found that OECD makes a significant contribution to character building, equitable access to education, and life skills development. However, OECD still faces several challenges such as socioeconomic disparities, low digital literacy, minimal parental involvement, fragmentation of community-based programs, and the significant impact of the COVID-19 pandemic on access to and quality of learning. This study recommends strengthening collaboration between schools, families, and communities, improving digital literacy, and integrating community programs to strengthen the role of OECD in realizing inclusive and sustainable education.

Keywords: out-of-school education, non-formal education, informal education, digital literacy, parental involvement, learning communities..

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses sepanjang hayat yang tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Dalam konteks tersebut, pendidikan luar sekolah – terutama yang berlangsung dalam keluarga dan masyarakat – memiliki peran yang sangat strategis. Pendidikan luar sekolah mencakup pendidikan non-formal dan informal, yang menjadi pendukung, pelengkap, sekaligus pengganti jalur pendidikan formal (Robianti et al., 2024).

Peran keluarga dalam pendidikan anak sering dipandang sebagai fondasi utama pembentukan karakter, nilai, dan keterampilan sosial. Menurut Bulqia Mas'ud et al. (2024), keterlibatan orangtua dalam proses belajar memiliki dampak signifikan terhadap prestasi akademik maupun non-akademik anak. Lebih jauh, Antony-Newman (2024) menyebut keterlibatan keluarga sebagai “modal sosial pendidikan” yang tidak tergantikan oleh institusi sekolah. Di sisi lain, masyarakat juga menyediakan ruang belajar yang kaya melalui pendidikan berbasis komunitas, lembaga non-formal, dan interaksi sosial sehari-hari (Supatmi & Sukari, 2024). Dengan demikian, keluarga dan masyarakat dapat dipandang sebagai ekosistem pendidikan yang saling melengkapi dengan sekolah.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi pendidikan luar sekolah. Pandemi COVID-19, misalnya, telah memperlihatkan adanya ketimpangan signifikan dalam akses pendidikan berbasis keluarga. Fitria & Pangesti (2023) menemukan bahwa keluarga dari kelompok ekonomi rendah menghadapi kendala besar dalam mendampingi anak belajar daring, baik karena keterbatasan literasi akademik maupun keterbatasan sarana digital. Fenomena serupa juga diungkap oleh Engzell et al. (2023) di Eropa, yang menunjukkan bahwa dampak pandemi terhadap kehilangan pembelajaran (*learning loss*) lebih besar dirasakan oleh anak-anak dari keluarga miskin. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa ketidaksetaraan sosial ekonomi menjadi isu utama dalam pendidikan luar sekolah.

Selain faktor ekonomi, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan dilema baru. Di satu sisi, teknologi membuka peluang besar bagi keluarga dan masyarakat untuk mengakses sumber belajar tanpa batas; di sisi lain, ketidakmerataan literasi digital mengakibatkan banyak keluarga, khususnya di daerah pedesaan, tertinggal dalam mendukung anak-anak mereka (Ahmad et al., 2023; Safitri, 2024). Oleh sebab itu, literasi digital keluarga dan masyarakat menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pendidikan luar sekolah di era transformasi digital.

Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan non-formal sering kali menghadapi tantangan koordinasi. Supatmi & Sukari (2024) menegaskan bahwa program pendidikan berbasis komunitas di Indonesia cenderung berjalan parsial tanpa integrasi dengan kebijakan sekolah dan pemerintah daerah. Hal ini berimplikasi pada kurangnya kesinambungan program serta rendahnya dampak jangka panjang terhadap peserta didik.

Dengan memperhatikan dinamika tersebut, penelitian dan kajian ilmiah tentang isu-isu pendidikan luar sekolah menjadi penting. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami definisi, tantangan, dan solusi strategis yang dapat diimplementasikan baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Sejalan dengan rekomendasi UNICEF (2024), pendidikan luar sekolah harus dipandang sebagai pilar penting untuk menjamin hak anak atas pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

1. Pendidikan Luar Sekolah sebagai Bagian Integral Sistem Pendidikan

Pendidikan luar sekolah (PLS) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan melalui tiga jalur: formal, non-formal, dan informal. Jalur pendidikan formal biasanya diidentikkan dengan sekolah, sedangkan pendidikan non-formal mencakup program-program seperti kursus, pelatihan, pendidikan kesetaraan, dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Adapun pendidikan informal terutama berlangsung dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Ketiga jalur ini bersifat saling melengkapi, bukan saling menggantikan, sehingga PLS memiliki posisi strategis sebagai bagian integral dari sistem pendidikan (Robianti et al., 2024).

Keberadaan PLS penting karena ia memberikan ruang fleksibel bagi pembelajaran yang tidak selalu bisa difasilitasi oleh sekolah formal. Menurut Mas'ud et al. (2024), pendidikan non-formal di Indonesia telah berperan signifikan dalam memberikan layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal, seperti anak putus sekolah, masyarakat pedesaan, atau kelompok marjinal. PLS juga berfungsi untuk mengembangkan kecakapan hidup (life skills) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti keterampilan digital, kewirausahaan, dan pendidikan berbasis komunitas.

Selain itu, PLS memiliki peran penting dalam memperkuat keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak. Antony-Newman (2024) menekankan bahwa keterlibatan orangtua dan keluarga dalam proses pendidikan merupakan bentuk "modal sosial" yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar anak. Hal ini diperkuat oleh Bulqia Mas'ud et al. (2024) yang menemukan bahwa keterlibatan keluarga berbanding lurus dengan prestasi akademik dan perkembangan emosional anak, meskipun keterlibatan ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi keluarga.

Dari perspektif global, pendidikan luar sekolah juga dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ke-4 yaitu "Pendidikan Berkualitas untuk Semua". UNESCO (2023) menegaskan bahwa pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning) tidak mungkin tercapai tanpa optimalisasi pendidikan non-formal dan informal. Dengan kata lain, keberadaan PLS tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi merupakan bagian inti dari strategi pembangunan manusia. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, PLS memiliki keunggulan karena sifatnya yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal. Supatmi & Sukari (2024) mencatat bahwa program pendidikan berbasis komunitas sering kali mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, misalnya pendidikan keaksaraan bagi ibu rumah tangga, pelatihan wirausaha untuk pemuda, atau pengajian berbasis literasi digital di masjid. Program semacam ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di masyarakat. Namun, agar PLS benar-benar menjadi bagian integral sistem pendidikan, diperlukan sinergi kuat antara jalur formal, non-formal, dan informal. Studi Robianti et al. (2024) di Jawa Timur menunjukkan bahwa ketika PKBM melibatkan orangtua dalam perancangan kurikulum daring, hasil pembelajaran menjadi lebih efektif dan relevan.

Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat tidak boleh dipandang sebagai pilihan, melainkan sebagai kebutuhan strategis.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pendidikan luar sekolah bukanlah “jalur pinggir” dalam sistem pendidikan nasional, melainkan jalur utama yang menopang keberhasilan pendidikan formal. PLS berfungsi sebagai sarana pemerataan kesempatan belajar, penguatan pendidikan keluarga, serta pengembangan kapasitas masyarakat. Melalui pendekatan yang inklusif, kolaboratif, dan kontekstual, pendidikan luar sekolah mampu memberikan kontribusi nyata dalam mencetak generasi yang berkarakter, terampil, dan siap menghadapi tantangan global.

2. Tantangan Pendidikan Luar Sekolah

a. Kesenjangan Sosial Ekonomi

Salah satu tantangan paling mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah (PLS) adalah kesenjangan sosial ekonomi yang masih tinggi di masyarakat. Pendidikan luar sekolah, baik yang berlangsung dalam keluarga maupun melalui lembaga masyarakat, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga dan komunitas tempat anak berada. Keluarga dari kelompok menengah ke atas umumnya mampu menyediakan sarana pendidikan tambahan di luar sekolah formal, seperti kursus, pelatihan keterampilan, atau fasilitas belajar di rumah. Sebaliknya, keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering kali menghadapi keterbatasan dalam menyediakan dukungan pendidikan non-formal maupun informal bagi anak-anak mereka (Bulqia Mas’ud et al., 2024).

Keterbatasan ekonomi keluarga berdampak langsung terhadap rendahnya partisipasi anak dalam program pendidikan non-formal. Studi Mas’ud et al. (2024) menunjukkan bahwa banyak anak dari keluarga miskin di Indonesia terpaksa bekerja membantu ekonomi keluarga, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengikuti kegiatan pendidikan di masyarakat. Hal ini menghambat upaya pemerataan akses pendidikan dan berkontribusi pada reproduksi siklus kemiskinan antargenerasi.

Selain itu, kesenjangan sosial ekonomi juga memengaruhi tingkat keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak. Antony-Newman (2024) menekankan bahwa keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi lebih mungkin terlibat secara aktif dalam pendidikan anak, baik dengan menyediakan fasilitas belajar maupun mendukung kegiatan non-formal seperti pelatihan bahasa atau seni. Sebaliknya, orangtua dari keluarga kurang mampu cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sehingga keterlibatan mereka dalam mendampingi anak belajar menjadi terbatas.

Kesenjangan ini semakin tampak jelas pada masa pandemi COVID-19. Fitria & Pangesti (2023) menemukan bahwa keluarga dengan keterbatasan ekonomi mengalami kesulitan besar dalam mendampingi anak belajar dari rumah, terutama karena keterbatasan perangkat digital, jaringan internet, dan literasi akademik orangtua. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Engzell et al. (2023) di Eropa, yang menunjukkan bahwa *learning loss* lebih besar dialami anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga kaya. Dengan demikian, pandemi tidak hanya memperlihatkan, tetapi juga memperdalam jurang kesenjangan pendidikan luar sekolah.

Dampak kesenjangan sosial ekonomi juga terlihat pada penyelenggaraan program pendidikan berbasis masyarakat. Supatmi & Sukari (2024) mencatat bahwa PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di daerah miskin sering kali menghadapi keterbatasan dana, tenaga pendidik, serta fasilitas belajar. Akibatnya, kualitas layanan pendidikan non-formal yang mereka berikan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kondisi ini memperkuat ketidakadilan dalam akses pendidikan yang bermutu antara masyarakat kaya dan miskin.

Oleh karena itu, kesenjangan sosial ekonomi dapat dikatakan sebagai hambatan struktural bagi penguatan peran pendidikan luar sekolah di Indonesia. Jika tidak ditangani, hal ini berpotensi memperlebar ketidaksetaraan dalam kualitas sumber daya manusia, memperburuk kemiskinan, dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas untuk semua.

b. Literasi Digital dan Akses Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan luar sekolah (PLS). Di era digital, keluarga dan masyarakat dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana mendukung proses belajar sepanjang hayat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan terkait literasi digital dan akses teknologi, yang menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan PLS.

Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak, produktif, dan bertanggung jawab. Menurut Ahmad et al. (2023), literasi digital keluarga memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas pendampingan belajar anak di rumah. Keluarga dengan tingkat literasi digital rendah cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses sumber belajar online, memahami aplikasi pembelajaran, atau membimbing anak dalam menggunakan media digital secara positif. Akibatnya, anak-anak dari keluarga tersebut lebih berisiko mengalami kesenjangan dalam pencapaian pendidikan dibandingkan anak dari keluarga yang melek digital.

Tantangan literasi digital ini diperparah oleh masalah akses teknologi. Tidak semua keluarga di Indonesia memiliki perangkat digital seperti laptop, tablet, atau bahkan smartphone yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Fitria & Pangesti (2023) menemukan bahwa keterbatasan perangkat digital menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak selama pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan jaringan internet, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, yang membuat akses terhadap materi pendidikan daring menjadi tidak merata.

Dari perspektif global, kesenjangan akses teknologi dikenal dengan istilah *digital divide*. Van Dijk & Hacker (2018) menjelaskan bahwa digital divide tidak hanya terkait dengan kepemilikan perangkat, tetapi juga dengan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan teknologi untuk tujuan pendidikan. Hal ini berarti bahwa meskipun perangkat tersedia, tanpa literasi digital yang memadai, keluarga dan masyarakat tetap tidak dapat memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendukung PLS.

Di Indonesia, fenomena ini tampak jelas pada lembaga pendidikan berbasis masyarakat seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Supatmi & Sukari (2024) mencatat bahwa banyak PKBM mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital karena keterbatasan sumber daya, baik dari segi infrastruktur maupun kompetensi pendidik. Akibatnya, program pendidikan non-formal yang seharusnya adaptif dengan perkembangan teknologi justru tertinggal dan tidak mampu menjangkau peserta didik secara luas.

Tantangan literasi digital juga berhubungan erat dengan aspek keamanan dan etika digital. Anak-anak yang kurang mendapat bimbingan dari keluarga dalam menggunakan internet berisiko terpapar konten negatif, cyberbullying, hingga kecanduan gawai. Safitri (2024) menegaskan bahwa rendahnya literasi digital di kalangan orangtua menjadi salah satu faktor utama yang membuat anak-anak tidak terlindungi secara optimal dalam dunia maya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan luar sekolah memiliki tanggung jawab bukan hanya dalam pemanfaatan teknologi untuk belajar, tetapi juga dalam penanaman nilai-nilai etika digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan literasi digital dan akses teknologi dalam PLS mencakup beberapa aspek: (1) keterbatasan perangkat dan jaringan internet, (2) rendahnya literasi digital keluarga dan masyarakat, (3) ketidakmampuan lembaga non-formal memanfaatkan teknologi, serta (4) risiko paparan dampak negatif teknologi pada anak. Jika tidak segera diatasi, tantangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antar kelompok sosial, serta menghambat tujuan pendidikan sepanjang hayat yang inklusif dan berkualitas.

c. Rendahnya Keterlibatan Orangtua

Keterlibatan orang tua (parental involvement) merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan anak, baik di sekolah formal maupun dalam pendidikan luar sekolah (PLS). Dalam konteks PLS, keterlibatan orang tua mencakup aktivitas mendampingi anak belajar di rumah, memberi dukungan moral dan emosional, serta mengarahkan anak untuk mengikuti kegiatan pendidikan non-formal atau berbasis masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua di Indonesia masih relatif rendah, terutama pada kelompok keluarga dengan keterbatasan sosial ekonomi dan literasi pendidikan.

Bulqia Mas'ud et al. (2024) menegaskan bahwa status sosial ekonomi keluarga sangat memengaruhi tingkat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah cenderung kurang terlibat dalam mendampingi anak belajar karena keterbatasan waktu, pengetahuan, dan akses terhadap sumber belajar. Hal ini menyebabkan anak-anak dari keluarga tersebut kurang mendapat dukungan optimal dalam pendidikan non-formal maupun informal.

Selain faktor ekonomi, rendahnya keterlibatan orang tua juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi pendidikan dan pemahaman peran orang tua. Banyak orang tua masih menganggap bahwa pendidikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab sekolah, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran anak di rumah maupun di masyarakat. Studi Antony-Newman (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua yang rendah sering kali berakar pada

kurangnya kesadaran bahwa mereka adalah "mitra utama" dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak.

Pandemi COVID-19 memperlihatkan secara nyata tantangan rendahnya keterlibatan orang tua. Fitria & Pangesti (2023) menemukan bahwa banyak orang tua kesulitan mendampingi anak belajar di rumah, baik karena keterbatasan waktu akibat tuntutan pekerjaan maupun karena kurangnya kemampuan dalam memahami materi pelajaran. Kondisi ini menimbulkan tekanan psikologis bagi anak, sekaligus memperburuk ketimpangan kualitas pendidikan luar sekolah.

Keterbatasan keterlibatan orang tua juga menjadi kendala bagi lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Menurut Supatmi & Sukari (2024), program pendidikan non-formal sering kali menghadapi hambatan partisipasi orang tua, baik dalam bentuk dukungan moral maupun materi. Hal ini membuat program yang dilaksanakan tidak berkelanjutan dan kurang berdampak pada perkembangan peserta didik.

Selain itu, faktor budaya juga memainkan peran penting. Dalam masyarakat patriarkis, peran pendidikan anak sering kali dibebankan hanya pada ibu, sementara ayah kurang terlibat aktif. Penelitian Ahmad et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua yang tidak seimbang antara ayah dan ibu menyebabkan anak tidak memperoleh dukungan penuh, khususnya dalam aspek pembentukan karakter dan keterampilan sosial.

Dengan demikian, rendahnya keterlibatan orang tua dalam PLS dapat dilihat dari beberapa dimensi utama: (1) keterbatasan waktu dan ekonomi, (2) rendahnya literasi pendidikan dan kesadaran peran orang tua, (3) kurangnya kemampuan mendampingi anak belajar di era digital, serta (4) faktor budaya yang membatasi partisipasi seimbang antara ayah dan ibu. Tantangan ini, jika tidak segera diatasi, dapat menghambat optimalisasi peran pendidikan luar sekolah sebagai pendukung pendidikan formal dan penguat pembelajaran sepanjang hayat.

d. Fragmentasi Program Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu wujud nyata dari pendidikan luar sekolah (PLS) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Program ini biasanya diwujudkan melalui lembaga seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), kelompok belajar, hingga kegiatan berbasis komunitas keagamaan. Meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat, pelaksanaan program berbasis masyarakat di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah fragmentasi program.

Fragmentasi program mengacu pada kondisi di mana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat berjalan secara parsial, tidak terintegrasi, dan sering kali berdiri sendiri tanpa koordinasi antar lembaga, sekolah, maupun pemerintah daerah. Supatmi & Sukari (2024) mencatat bahwa banyak PKBM di Indonesia mengelola program keaksaraan, kesetaraan, maupun pelatihan keterampilan secara terpisah tanpa adanya sinergi yang jelas dengan sekolah formal atau lembaga pendidikan non-formal lainnya. Hal ini berdampak pada rendahnya keberlanjutan program serta minimnya dampak jangka panjang bagi peserta didik.

Selain itu, fragmentasi juga terlihat pada tumpang tindihnya program yang digagas oleh berbagai instansi. Misalnya, program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi keagamaan sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang baik. Akibatnya, terjadi duplikasi program di satu wilayah sementara wilayah lain tidak terlayani (Mas'ud et al., 2024). Kondisi ini bukan hanya mengurangi efektivitas, tetapi juga menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Keterbatasan pendanaan juga memperparah fragmentasi. Banyak program pendidikan berbasis masyarakat bergantung pada proyek jangka pendek yang dibiayai donor atau pemerintah. Ketika sumber pendanaan berhenti, program tidak berlanjut, sehingga kontinuitas pendidikan terganggu. Robianti et al. (2024) menemukan bahwa lemahnya dukungan finansial dan kurangnya kolaborasi antar lembaga menjadi penyebab utama banyaknya program non-formal di Jawa Timur yang berhenti di tengah jalan.

Fragmentasi juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola. Banyak pengelola PKBM dan lembaga masyarakat belum memiliki kompetensi manajerial dan pedagogis yang memadai untuk merancang program yang relevan dan berkelanjutan. UNESCO (2023) menegaskan bahwa salah satu hambatan terbesar pendidikan non-formal di negara berkembang adalah kurangnya koordinasi antar lembaga serta rendahnya kapasitas pengelola dalam mengintegrasikan program dengan sistem pendidikan formal.

Dampak dari fragmentasi ini adalah kurangnya dampak signifikan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Peserta didik hanya memperoleh manfaat sementara tanpa kesinambungan, dan masyarakat tidak mendapatkan pola pendidikan yang terstruktur. Akibatnya, PLS yang seharusnya menjadi pilar pendidikan sepanjang hayat justru dipandang sekadar sebagai "program tambahan" yang tidak terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional.

Dengan demikian, fragmentasi program pendidikan berbasis masyarakat merupakan tantangan krusial yang harus segera ditangani. Tanpa integrasi yang kuat antar lembaga, sekolah, keluarga, dan pemerintah, potensi pendidikan luar sekolah tidak akan optimal dalam mendukung pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

e. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 telah membawa dampak besar terhadap sistem pendidikan global, termasuk jalur pendidikan luar sekolah (PLS). Sebagai jalur pendidikan non-formal dan informal yang berlangsung di keluarga maupun masyarakat, PLS menghadapi tantangan serius karena perubahan mendadak dari pola pembelajaran tatap muka ke pembelajaran jarak jauh (daring). Situasi ini tidak hanya memperlihatkan kerentanan PLS, tetapi juga memperdalam kesenjangan pendidikan di Indonesia.

Salah satu dampak paling nyata dari pandemi adalah terhambatnya akses pendidikan luar sekolah bagi kelompok rentan. Banyak anak yang sebelumnya mengikuti kegiatan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), taman bacaan,

atau kelompok belajar masyarakat harus berhenti karena pembatasan aktivitas tatap muka. Studi Supatmi & Sukari (2024) menunjukkan bahwa banyak lembaga PLS mengalami penurunan partisipasi secara drastis akibat keterbatasan fasilitas daring dan kurangnya kesiapan pengelola dalam beradaptasi dengan teknologi digital.

Selain itu, pandemi memperlihatkan ketimpangan dalam literasi digital dan dukungan keluarga. Fitria & Pangesti (2023) menemukan bahwa orang tua dari keluarga berpenghasilan rendah mengalami kesulitan mendampingi anak belajar di rumah karena keterbatasan perangkat, jaringan internet, dan kemampuan akademik. Kondisi ini menyebabkan keterlibatan orang tua semakin rendah, sehingga anak-anak lebih berisiko mengalami *learning loss*. Fenomena *learning loss* juga menjadi isu global. Engzell et al. (2023) dalam penelitiannya di Eropa menemukan bahwa anak-anak dari keluarga miskin kehilangan capaian belajar lebih banyak dibanding anak-anak dari keluarga kaya selama masa pandemi. Hal ini sejalan dengan situasi di Indonesia, di mana pandemi memperlebar kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial-ekonomi.

Pandemi juga memengaruhi aspek psikososial. Anak-anak yang kehilangan kesempatan mengikuti kegiatan berbasis masyarakat mengalami penurunan interaksi sosial, meningkatnya stres, serta menurunnya motivasi belajar. UNICEF (2021) melaporkan bahwa penutupan sekolah dan pembatasan sosial berdampak signifikan pada kesehatan mental anak, terutama mereka yang tidak mendapatkan dukungan optimal dari keluarga. Dalam konteks PLS, hal ini berarti keluarga dan masyarakat harus berperan lebih besar dalam menjaga keseimbangan mental dan emosional anak, namun tidak semua memiliki kapasitas untuk itu.

Dari sisi kelembagaan, pandemi mengungkap kelemahan struktural PLS di Indonesia, yaitu ketergantungan pada pertemuan tatap muka dan minimnya inovasi digital. Banyak PKBM, TBM, maupun kelompok belajar masyarakat yang tidak mampu melanjutkan program secara daring. Mas'ud et al. (2024) mencatat bahwa lemahnya integrasi PLS dengan teknologi digital menyebabkan banyak peserta didik di daerah pedesaan tertinggal dalam pembelajaran. Dengan demikian, dampak pandemi COVID-19 terhadap PLS dapat dilihat dalam beberapa aspek utama:

1. Penurunan partisipasi dalam program PLS karena pembatasan sosial.
2. Kesenjangan literasi digital dan akses teknologi di tingkat keluarga dan masyarakat.
3. Rendahnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi pembelajaran daring.
4. Meningkatnya risiko *learning loss* dan kesenjangan sosial-ekonomi.
5. Dampak psikososial berupa penurunan interaksi sosial, motivasi belajar, dan kesehatan mental anak.

Semua tantangan tersebut menunjukkan bahwa pandemi tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga krisis pendidikan yang memperlihatkan kerentanan sistem PLS di Indonesia.

3. Solusi Strategis Pendidikan Luar Sekolah

a. Penguatan Kolaborasi Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat

Keterlibatan keluarga dan masyarakat harus dilihat sebagai kemitraan pendidikan yang setara. Antony-Newman (2024) menawarkan kerangka kebijakan keterlibatan

orangtua yang dapat diadopsi untuk memperkuat hubungan antara guru, orangtua, dan komunitas. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui forum komunikasi rutin, pelatihan orangtua, dan kegiatan berbasis komunitas yang melibatkan sekolah.

b. Perluasan Program Non-Formal dan Komunitas

Lembaga non-formal seperti PKBM dan sanggar belajar perlu diperkuat agar dapat menjangkau anak-anak yang tidak mampu mengakses sekolah formal. Studi Robianti et al. (2024) menegaskan bahwa ketika orangtua dilibatkan dalam penyusunan kurikulum PKBM, tingkat efektivitas pembelajaran meningkat. Oleh karena itu, desain program non-formal perlu partisipatif dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

c. Dukungan Ekonomi untuk Keluarga Rentan

Pendidikan luar sekolah tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan ekonomi bagi keluarga miskin. UNICEF (2024) merekomendasikan program beasiswa, subsidi internet, serta bantuan langsung tunai untuk memastikan anak tetap dapat belajar. Kebijakan afirmatif ini akan menurunkan risiko putus sekolah sekaligus memperkuat peran keluarga dalam pendidikan.

d. Pengembangan Literasi Digital Inklusif

Literasi digital menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pendidikan luar sekolah di era modern. Ahmad et al. (2023) mengusulkan pelatihan literasi digital berbasis keluarga sebagai strategi inklusi. Dengan pelatihan ini, orangtua dapat lebih percaya diri dalam mendampingi anak, sekaligus mengurangi risiko negatif penggunaan teknologi.

e. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Menurut Guo (2025), keberhasilan keterlibatan orangtua dalam pendidikan bergantung pada evaluasi rutin terhadap hambatan dan capaian. Evaluasi juga penting dilakukan terhadap program komunitas untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Prospek Pendidikan Luar Sekolah di Indonesia

Jika solusi di atas dapat diimplementasikan, pendidikan luar sekolah berpotensi menjadi motor penggerak pembangunan pendidikan inklusif di Indonesia. Pendidikan keluarga akan semakin berperan dalam menanamkan nilai moral dan spiritual, sementara pendidikan berbasis masyarakat dapat menjawab kebutuhan keterampilan hidup dan pemberdayaan. Dengan dukungan teknologi digital, pendidikan luar sekolah bahkan dapat menjadi sarana pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

1. Peluang dari Regulasi dan Kebijakan Nasional

Pendidikan luar sekolah (PLS) telah mendapat legitimasi kuat dalam sistem pendidikan nasional melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menempatkannya sejajar dengan pendidikan formal dan nonformal. Pemerintah semakin mendorong program PLS sebagai bagian dari upaya pemerataan akses, terutama bagi masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal. Hal ini menunjukkan prospek PLS ke depan semakin terbuka lebar.

2. Kebutuhan Pendidikan Sepanjang Hayat (Life-long Learning)

Masyarakat modern dituntut untuk selalu mengembangkan keterampilan baru seiring perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial. PLS menjadi wadah utama dalam mengakomodasi prinsip pendidikan sepanjang hayat, baik melalui kursus, pelatihan kerja, pendidikan masyarakat, hingga program pemberdayaan.

3. Dukungan terhadap Peningkatan Keterampilan Kerja

Indonesia sedang menghadapi bonus demografi, dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. PLS berperan penting menyiapkan tenaga kerja terampil melalui balai latihan kerja, kursus keterampilan, dan pelatihan vokasional yang lebih fleksibel dibandingkan pendidikan formal. Prospeknya, PLS dapat menjadi salah satu solusi mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja.

4. Pemberdayaan Komunitas dan Masyarakat

PLS juga diarahkan untuk memberdayakan masyarakat melalui program seperti keaksaraan fungsional, pelatihan wirausaha, dan kegiatan pemberdayaan perempuan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan berbasis komunitas, PLS akan semakin relevan sebagai sarana transformasi sosial dan peningkatan kesejahteraan.

5. Pemanfaatan Teknologi Digital

Transformasi digital membuka prospek baru bagi PLS. Program pembelajaran berbasis e-learning, kursus online, aplikasi edukasi, dan platform pembelajaran terbuka memungkinkan masyarakat belajar tanpa terikat ruang dan waktu. Dengan penetrasi internet yang terus meningkat di Indonesia, PLS memiliki kesempatan memperluas jangkauan dan efisiensi pembelajarannya.

6. Kontribusi dalam Pendidikan Karakter dan Kewargaan

Selain keterampilan kerja, PLS berprospek besar dalam membangun karakter, literasi digital, kewirausahaan sosial, hingga kesadaran lingkungan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia menghadapi tantangan globalisasi dan era digital, di mana kecakapan hidup (life skills) menjadi sama pentingnya dengan ijazah akademik.

7. Kolaborasi Multi Pihak

Prospek PLS juga didukung dengan peluang kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha/industri, dan perguruan tinggi. Kerja sama lintas sektor ini dapat memperkuat kualitas program dan memperluas jangkauan layanan PLS.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap jalur pendidikan luar sekolah (PLS), baik yang berbasis keluarga maupun masyarakat. Pembatasan sosial dan penutupan fasilitas pendidikan non-formal mengakibatkan penurunan partisipasi peserta didik serta terhentinya berbagai program berbasis masyarakat. Tantangan utama yang muncul meliputi keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital, minimnya keterlibatan orang tua, serta meningkatnya risiko *learning loss* terutama pada kelompok rentan secara sosial-ekonomi.

Selain itu, pandemi memperlihatkan kerentanan struktural PLS di Indonesia yang masih sangat bergantung pada metode tatap muka dan belum optimal dalam

memanfaatkan teknologi digital. Dampak psikososial, seperti menurunnya interaksi sosial, motivasi belajar, dan kesehatan mental anak, semakin memperparah kondisi tersebut. Dengan demikian, pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga krisis pendidikan yang memperlebar kesenjangan belajar di masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya revitalisasi PLS melalui inovasi digital, penguatan peran keluarga, dan pengembangan model pembelajaran berbasis masyarakat yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Saran

1. Lembaga pendidikan perlu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dalam pengelolaan administrasi agar setiap bidang dapat berjalan lebih efektif.
2. Pemanfaatan teknologi informasi perlu dioptimalkan untuk mendukung efisiensi dan akurasi administrasi pendidikan.
3. Koordinasi antarbidang administrasi harus diperkuat guna memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan program pendidikan.
4. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perlu menjadi prioritas untuk menunjang mutu proses pembelajaran.
5. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Boli, M. (2024). *Inovasi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah berbasis religius siswa di SMA Muhammadiyah UNISMUH Makassar*. el-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 10(2). Temuan inovasi mencakup metode, media, peran guru, dan strategi pembelajaran berbasis agama.
- Darlina Sormin et al. (2023). *Inovasi pembaharuan pendidikan Muhammadiyah*. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 11(2), 1-12. Mengulas identitas tajdid Muhammadiyah dan implikasinya dalam pendidikan.
- Ikhsanudin, I., Setiadi, W., & Nursikin, M. (2022). *Inovasi dan literasi kurikulum Pendidikan Agama Islam di era globalisasi*. Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan, 2(1), 1-10. Menekankan pentingnya integrasi nilai keislaman dan literasi digital.
- Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. (2021). *Kurikulum Pendidikan Muhammadiyah – Jenjang Dasar dan Menengah (modifikasi kurikulum nasional dengan integrasi AIK)*.
- Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. (2019). *Pedoman Pendidikan AIK di Sekolah Muhammadiyah (Dokumen Majelis Dikdasmen)*. Sumber utama kurikulum BAI Muhammadiyah.
- Muhtadi, I. & Muttaqin, M. (2022). *Pendidikan Islam berkemajuan: konsep dan implementasi di Muhammadiyah*. Al-Tadzkiy.
- Nurlaeli, A. (2020). *Inovasi pengembangan kurikulum PAI pada madrasah menghadapi era milenial*. Wahana Karya Ilmiah Pendidikan, 4(1). Mengajukan model kurikulum terpadu untuk PAI.

- Qolbiyah, A., Mansur, A., & Bakar, A. (2022). *Konsep inovasi kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia (JPI)*. Uraian konsep penting bagi inovasi kurikulum PAI / BAI.
- Suryanto, J., Mustofa, T. A., & Maksun, M. N. R. (2023). *Inovasi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah berbasis teknologi informasi di sekolah Muhammadiyah unggulan (Surakarta & Sukoharjo)*. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 7759–7764. Penggunaan e-learning, media digital dan aplikasi pembelajaran.
- Taufiq, T., Setiawan, H. S., Sukiman, & Nadziroh (2023). *Modernisasi pengembangan kurikulum PAI di Muhammadiyah dan NU*. *Jurnal Ilmiah Profesi Guru (JIPG)*, 4(2), 99–106. Diskusi tentang modernisasi kurikulum PAI dalam konteks Muhammadiyah.